

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah dilihat dari faktor penyebabnya secara keseluruhan skor total dari rekapitulasi adalah 5572 dengan nilai indeks maksimal 8500 dan nilai indeks minimal 1700 sehingga mendapatkan hasil persentase 65.55% dengan kriteria kuat. Resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor *habbit* atau kebiasaan, faktor *far of the unknown* atau rasa takut, dan faktor ekonomi. Faktor kebiasaan dan faktor rasa takut menjadi faktor dominan yang membuat masyarakat melakukan resistensi karena masyarakat sudah terbiasa dengan sistem sebelumnya dan takut apabila dengan sistem baru masyarakat tidak akan mendapatkan yang masyarakat bisa dapatkan apabila menggunakan sistem sebelumnya pada penerimaan peserta didik baru. Sedangkan untuk faktor ekonomi hanya pada kriteria cukup karena masyarakat banyak mendapat bantuan untuk sekolah anaknya.
- 5.1.2 Resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah dilihat dari bentuk resistensinya secara keseluruhan skor total dari rekapitulasi adalah 2359 dengan nilai indeks maksimal 5000 dan nilai indeks minimal 1000 sehingga mendapatkan hasil persentase 47.185% dengan kriteria cukup karena masyarakat hanya melakukan resistensi tertutup sementara resistensi semi terbuka dan resistensi terbuka tidak dilakukan oleh masyarakat. Bentuk resistensi yang terjadi pada masyarakat diantaranya penyebaran isu/gossip, kecemasan, dan kekecewaan pada diri masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah. Masyarakat menyebarkan isu/gossip atau membicarakan

tentang sistem zonasi sekolah dengan tidak sesuai faktanya. Masyarakat pun merasa cemas dengan diterapkannya sistem zonasi sekolah karena cemas jika anaknya tidak bersekolah disekolah yang tidak favorit. Masyarakat juga merasakan kekecewaan terhadap sistem zonasi sekolah karena anaknya tidak dapat mengukur kemampuannya dan mengembangkan potensinya disekolah yang mereka anggap sebagai sekolah favorit.

- 5.1.3 Hasil rekapitulasi dari faktor penyebab terjadinya resistensi di masyarakat dan bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat menghasilkan jumlah skor 8576 dengan persentase 63.52%. Berdasarkan tabel interpretasi skor, persentase 63.52% termasuk ke dalam kriteria kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa resistensi yang terjadi di masyarakat berada pada tingkat kuat.
- 5.1.4 Harapan masyarakat terhadap pemerintah agar dapat melakukan pemerataan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran serta pemerataan kualitas guru/pengajar. Selain itu, melakukan keadilan dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi, jangan hanya sekolah-sekolah tertentu yang memiliki peluang yang besar. Jika itu semua sudah terwujud, masyarakat akan merasa tenang kalau anaknya bersekolah di sekolah manapun. Pemerintah juga sudah melakukan tindakan, dimulai dari bantuan untuk siswa yang kurang mampu dan bantuan untuk operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah merupakan cara agar dapat memeratakan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran akan tetapi karena siswanya banyak terpusat di sekolah favorit sehingga yang mendapat bantuan dengan jumlah besar yaitu sekolah favorit sebab bantuan operasional sekolah menghitung jumlah siswa pada suatu sekolah. maka dari itu, pemerintah ingin membagi jumlah siswa dengan sistem zonasi agar siswa tidak terkumpul di satu sekolah saja. Dengan begitu bantuan pun dapat merata ke setiap sekolah. pemerintah juga sedang mempersiapkan kebijakan dedistribusi guru atau pemerataan guru. Nantinya pada suatu kabupaten/kota guru akan terus mengalami

mutasi dari sekolah satu ke sekolah lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pada sekolah tujuan sehingga guru akan terbagi kedalam empat kelompok yakni guru PNS bersertifikasi, guru PNS tidak bersertifikasi, guru honorer bersertifikasi, dan guru honorer tidak bersertifikasi. Guru PNS bersertifikasi dianggap memiliki kompetensi yang lebih daripada guru-guru lainnya.

## 5.2 Implikasi

Penelitian mengenai resistensi masyarakat terhadap sistem zonasi sekolah menengah atas negeri di Kota Bandung bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya resistensi, bentuk resistensi, dan bagaimana upaya mengatasi resistensi masyarakat. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem zonasi sekolah terkait tujuan dan manfaat diterapkannya sistem zonasi sekolah. Penelitian ini dapat diimplikasikan ke dalam dunia pendidikan terutama pada mata pelajaran geografi kelas XII pada bab wilayah dan pelayaran dalam rencana tata ruang sebagai berikut : Kompetensi Dasar 3.1 : Memahami konsep wilayah dan pelayaran dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Materi pokok :

1. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah
2. Perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
3. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah.

## 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi yang telah diuraikan menunjukkan gambaran hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat peneliti kemukakan baik bagi masyarakat maupun pemerintah Kota Bandung agar kebijakan sistem zonasi sekolah dapat terlaksana serta mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan tujuannya. Adapun rekomendasi penelitian sebagai berikut :

### 5.3.1 Masyarakat

Masyarakat harus lebih bersabar karena untuk menciptakan suatu pendidikan yang merata baik dari kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana serta guru/pengajar memerlukan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak sedikit. Apalagi untuk membuat keadilan dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi karena untuk hal tersebut melibatkan dua kementerian yang berbeda yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. Masyarakat juga harus tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah karena sebelum kebijakan tersebut diterapkan tentunya telah melalui pengujian dan sebagainya. Karena dalam mewujudkan sebuah cita-cita besar suatu negara harus adanya sinergi diantara pemerintahan dan masyarakatnya.

### 5.3.2 Pemerintah

Pemerintah harus lebih sering memantau perkembangan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga harus tahu apa kendala dilapangan ketika kebijakannya sudah diterapkan dan apa yang kurang sesuai serta apa yang perlu lebih dikembangkan lagi. Sehingga akan meminimalisir gerakan resistensi dari masyarakat baik itu dalam bentuk resistensi tertutup, semi terbuka, maupun terbuka. Pemerintah juga harus lebih mengkaji baik buruknya kebijakan sebelum ditetapkan serta mengetahui kebijakan mana yang harus terlebih dahulu diterapkan jangan sampai saling tumpang tindih antara kebijakan satu dengan kebijakan lainnya contohnya penerapan sistem zonasi akan tetapi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas guru/pengajar belum merata disetiap sekolah bahkan disetiap wilayah. Intinya harus tahu apa yang masyarakat butuhkan.